

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP SARANA PUBLIK TROTOAR OLEH DINAS
PERHUBUNGAN DI KECAMATAN WENANG KOTA MANADO**

STHUMBELINA AUDREY ANGELICA TABISI

FLORENCE DAICY JETTY LENGKONG

VERY YOHANIS LONDA

bella16audrey@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the effect of supervision from the service on public sidewalk facilities in Wenang District in the study of public administration. This research uses a quantitative method by using the dimensions of setting measuring instruments or standards, carrying out assessment or evaluation actions, carrying out corrective actions for monitoring variables, having the right dimensions, appropriate structure and slope, stairs that are friendly for the disabled, comfortable, and safe, and using utility canals or drainage manhole covers for the variable sidewalk public facilities. This study used simple linear regression analysis with data collected using instruments in the form of questionnaires or questionnaires with a Likert scale. The results of the research under investigation show that supervision from the Department of Transportation has a positive effect on public sidewalk facilities in Wenang District. Government oversight in terms of setting measuring instruments or standards, carrying out assessment or evaluation actions, and taking corrective actions is in accordance with procedures or rules, but the quality of existing processes is still not optimal.

Keywords: Monitoring, Public Facilities, Sidewalk

PENDAHULUAN

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitasnya. Fungsi fasilitas trotoar adalah pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan di jalan, sehingga pejalan kaki terlindung dari benturan kendaraan di jalan. Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan bermotor, karena dengan adanya pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan motor maka akan memperlambat laju kendaraan, sehingga dengan adanya pembagian antara jalur untuk yang berkendara dengan jalur pejalan kaki maka akan tercipta ketertiban.

Fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar dibuat untuk keamanan dan kenyamanan pejalan kaki dari benturan kendaraan di jalan, sehingga pejalan kaki terlindungi dari benturan kendaraan di jalan. Pemisahan ini juga dapat dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan roda dua maupun roda empat, karena dengan adanya pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan roda dua maupun roda empat maka akan memperlambat laju kendaraan. Berdasarkan pengamatan terhadap sarana publik trotoar yang peneliti lakukan di Kecamatan Wenang didapati bahwa trotoar sebagaimana untuk pejalan kaki tidak memanfaatkan jalur pejalan kaki atau trotoar sesuai dengan fungsinya khususnya di wilayah Kelurahan Wenang Selatan (jalan Piere Tendean), Kelurahan Wenang Utara (disepanjang jalan Wenang),

Kelurahan Pinaesaan (sepanjang jalan Suprpto). Berdasarkan survey pengamatan yang dilakukan peneliti didapati bahwa kondisi trotoar yang telah ada saat ini kurang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki di wilayah Kecamatan Wenang juga dialih fungsikan oleh para penjual kaki lima serta parkir liar dan sudah mengganggu aktivitas para pejalan kaki.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti memandang perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengawasan Terhadap Sarana Publik Trotoar oleh Dinas Perhubungan di Kecamatan Wenang Kota Manado.”

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Della Chelsea Mokosolang, F.D.J. Lengkong, dan Gustaaf B. Tampi (2020) dengan judul Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Teori yang peneliti ini gunakan untuk pengawasan adalah di ambil dari Hasibuan dalam Takbir, dkk (2016) yang pada dasarnya ada dua jenis metode pengawasan/pengendalian, yaitu:
 - a. Pengawasan/pengendalian preventif (*preventive control*); adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilakukan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
 - b. Pengawasan/pengendalian represif (*repressive control*); adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan atau setelah terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud tidak terjadi pengulangan kesalahan.

Dari penelitian yang dilakukan ini maka didapati hasil bahwa, kebijakan atau peraturan dari pemerintah belum efektif memecahkan masalah karena belum meminimalisir kriminalitas akibat minuman beralkohol serta beberapa masyarakat yang masih masa bodoh dengan peraturan kebijakan yang ada. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan para pelaksana kebijakan sudah efektif dalam pelaksanaan pengawasan karena masing-masing pelaksana kebijakan memiliki proses-proses dalam pengawasan minuman beralkohol. Lalu yang ketiga adalah belum efektifnya kebijakan dalam target karena kebijakan tentang minuman beralkohol yang ada di Sulawesi Utara bertentangan dengan peraturan lain yaitu Permendag dimana Permendag sudah melarang penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket tetapi dalam peraturan kebijakan di Provinsi Sulut tentang minuman beralkohol masih memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket.

2. Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Suwinli Juhandi Liju, Salmin Dengo, Very Londa (2017) yang diberi judul Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, pengawasan Camat dalam pelaksanaan APB-Desa dilihat berdasarkan konsep pengawasan dari Terry (2000), yang mengemukakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu : (1) mengukur hasil pekerjaan, dengan cara observasi/pengamatan secara pribadi, laporan-laporan tertulis, dan laporan-laporan lisan; (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan

memastikan perbedaan apabila ada perbedaan; dan (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan langsung Camat dalam pelaksanaan APB-Desa juga dilakukan dengan turun langsung ke desa-desa untuk memantau pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh APB-Desa. Dalam supervisi langsung ini camat mencocokkan laporan yang disampaikan oleh kepala desa dengan kondisi nyata, dan jika menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan camat langsung memberikan teguran kepada kepala desa dan kemudian memberikan petunjuk/arahan perbaikannya. Namun kegiatan pengawasan seperti itu belum secara optimal dilakukan langsung oleh Camat, tetapi lebih banyak menugaskan kepada bawahannya. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan APB-Desa sudah dilakukan oleh Camat, namun belum secara optimal.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chantika Sari Dilapanga, Alden Laloma dan Very Londa (2020) diberi judul Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu oleh George R. Terry dalam Winardi (2006: 395) yang juga dijadikan sebagai acuan atau Indikator yang dapat mengukur pengawasan yaitu: ukuran atau standar pekerjaan, penilaian pekerjaan, perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar pekerjaan, perbaikan atas penyimpangan. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian pemerintah, tidak

melakukan fungsi pengawasan secara optimal atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan tidak efektif atau tidak membawa perubahan dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan yang dilaksanakan di DPRD kabupaten Bolaang Mongondow.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel yang diteliti dengan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Mengumpulkan data dengan kuesioner atau angket, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan populasi dan sampel, menguji data dengan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas data, uji linearitas, uji korelasi antara variabel X dan Y. teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data juga menggunakan cara analisis regresi linear sederhana. Semuanya diuji menggunakan bantuan Aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 25.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari permasalahan yang didapati dengan menggunakan pedoman teori serta peraturan pemerintah, serta untuk mengetahui pengaruh variabel Pengawasan (X) terhadap variabel Sarana Publik Trotoar (Y), peneliti mengumpulkan data melalui responden yang telah ditetapkan sebelumnya yakni pegawai instansi pemerintahan di Dinas Perhubungan Kota Manado yang berjumlah 10 responden. Data ini dihasilkan dari pembagian kuesioner dengan jumlah masing-masing 7 pernyataan untuk variabel X dan 8 pernyataan untuk

variabel Y. Setiap pernyataan memiliki 5 alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert.

Dari uji validitas untuk variabel X dan Y diketahui semua pernyataan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan Variabel X dan Y adalah valid. Selanjutnya, berdasarkan uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel X berada pada taraf 0,866 – 0,886 atau reliabilitas sempurna begitu juga pada variabel Y yang berada pada taraf 0,863-0,893 atau reliabilitas tinggi dikarenakan kedua variabel berada pada tarafnya yaitu di antara 0,70 – 0,90. Dengan demikian kedua variabel dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan regresi sederhana maka diperoleh $\hat{Y} = 6,405 + 0,923X$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa antara variabel Pengawasan (X) dengan variabel Sarana Publik Trotoar (Y) terdapat besaran pengaruh yang linear, setiap penambahan 1% nilai Pengawasan, maka nilai Sarana Publik Trotoar bertambah hingga 0,923. Berdasarkan hasil diatas maka Pengawasan berpengaruh terhadap Sarana Publik Trotoar, sehingga hipotesis yang dikemukakan peneliti dapat diterima. Selanjutnya berdasarkan analisis menggunakan korelasi *product moment* dari Pearson maka diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,869 dan koefisien determinasi (R Square) 0,756 dengan arah pengaruh yaitu positif. Hasil inilah yang dapat dikatakan bahwa sarana publik trotoar bisa ditentukan oleh pengawasan Dinas Perhubungan sebesar 75,6%, sedangkan 24,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain. Pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sarana publik trotoar yang diberikan kepada masyarakat banyak secara aman, nyaman dan bersih. Menetapkan standar, pengukuran, membandingkan dan melakukan tindakan

yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yang dapat membantu mereka dalam mengawasi dan menghadapi permasalahan yang terjadi selama menjalankan tugas. Aparatur yang memiliki empat kemampuan ini akan menyelesaikan tugas kerjanya secara maksimal dan baik. Demikianlah semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan maka semakin baik pula sarana publik trotoar yang akan dipakai oleh masyarakat

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berpengaruh terhadap sarana publik trotoar yang ada di Kecamatan Wenang dengan menetapkan alat ukur atau standar-standar yang sesuai dengan aturan yang berlaku antara Dinas Perhubungan dan sarana public trotoar. Semakin baik pengawasan maka semakin baik pula sarana publik yang disediakan terlebih khususnya trotoar yang digunakan oleh masyarakat.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan tindakan penilaian diantaranya yaitu melakukan pelaporan dengan apa yang terjadi dilapangan antara target dengan standar memiliki pengaruh paling besar sedangkan pengawasan secara melakukan tindakan dengan cara koreksi atau perbaikan dan *follow up* memiliki pengaruh paling kecil.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui tindakan perbaikan dimana dapat memberikan teguran atau peringatan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran saat menggunakan sarana publik trotoar di Kecamatan Wenang yang sudah dibangun. Serta melakukan perbaikan atas terjadinya kerusakan pada sarana public terlebih khususnya trotoar.

Saran

1. Untuk memaksimalkan pengawasan Dinas Perhubungan yang lebih baik, adapun sebaiknya dengan menetapkan pembagian tugas dan fungsi secara jelas, sehingga sarana public trotoar yang sudah dibangun dan digunakan dapat berjalan sesuai dengan aturan atau program yang diinginkan.
2. Agar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan lebih baik lagi, perlu adanya kunjungan secara langsung dan rutin serta menerapkan aturan yang berlaku secara tegas dan baik kepada pengguna trotoar sehingga sudah tidak ada lagi didapati bangku atau tempat duduk yang rusak, tempat sampah yang rusak atau tidak lengkap, *guiding block* yang tercabut, *manhole cover* yang patah atau tidak rata di beberapa tempat yang perlu segera diperbaiki untuk menunjang kenyamanan pejalan kaki serta kebersihan, kendaraan bermotor yang masih memarkirkan kendaraannya di atas trotoar dan pedagang kaki lima yang membangun tendanya pada waktu sore hingga malam di beberapa tempat. Adanya kunjungan secara rutin sesuai dengan aturan yang ada dapat mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi di atas sarana trotoar.
3. Perlunya memaksimalkan pengawasan dalam hal tindakan perbaikan melalui teguran atau peringatan secara tulisan maupun lisan terhadap pengguna trotoar, serta tindakan perbaikan sarana publik yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik untuk kenyamanan masyarakat yang dimana sebagai pengguna trotoar.

Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6
No. 90. Hal. 1-11

Liju, S., S. Dengo dan V. Londa (2017)
Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 4 No. 90. Hal. 1-7

Mokosolang, C.D, F.D.J. Lengkong dan G.B. Tampi. 2020. *Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6 No. 88. Hal 1-7

DAFTAR PUSTAKA

Dilapanga, C., A. Laloma dan V. Londa.
2020. *Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow*.